

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamis ke-79

JSKK Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181 Fac. 021-3913473

Nomor : 51/Surat Terbuka_JSJKK/VII/2008

Jakarta, 28 Agustus 2008

Hal : Belajar dari Kasus Munir –

Cerminan Penegakan HAM Indonesia

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

Bapak **Susilo Bambang Yudhoyono**

Jakarta

Bapak Presiden terhormat, sebagaimana diketahui bersama pada Kamis, 21 Agustus 2008 lalu di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejarah baru dicatat. Untuk pertama kalinya, Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono dihadapkan di pengadilan dalam kasus pembunuhan konspiratif aktivis kemanusiaan Munir. Peristiwa ini teramat penting bagi publik nasional maupun internasional. Terutama bagi kami yang haus akan keadilan dan merindukan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Berdasarkan perkembangan kasus yang menyembulkan harapan tersebut, kami ingin sampaikan bahwa cita-cita untuk menerima keadilan atas kasus kami bukanlah mustahil. Tuntutan agar dapat mengadili para pelaku pelanggaran HAM, terutama mantan petinggi militer yang bertanggungjawab dalam Kasus 65, Talangsari-Lampung, Tanjung Priok, Ambon, Trisakti, Semanggi I-II dan lainnya, sesungguhnya “mudah”.

Mengadili pelaku pelanggaran HAM di Indonesia memang mudah, karena terbukti dalam kasus Munir yang dibutuhkan hanya “kemauan” (*willingness*). Belajar dari kasus Munir, kami merasakan “kemauan” itu ada, meski kami menilai hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan usaha pembongkaran jejaring konspirator dibalik kasus Munir, terutama, mantan Kepala BIN, Hendropriyono yang banyak diduga bertanggungjawab secara institusi.

Bapak Presiden, sebagaimana diketahui bersama, beberapa kasus kami, seperti kasus Trisakti, Semanggi I-II, Wasior-Wamena, dst, sampai saat ini masih berada dan berkasnya bertumpukkan di meja Jaksa Agung. Hal ini berarti, wewenang anda sebagai presiden pada kasus-kasus tersebut belum digunakan secara optimal. Entah apa alasannya.

Oleh karena itu, Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini, kami harus mengingatkan dan mengkoreksi kembali komitmen anda pada penyelesaian kasus Munir. Jika anda anggap kasus Munir adalah “A test of our history” maka kami anggap terbengkalainya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai “a very bad rapport of our history”.

Bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, diakhir masa jabatan anda, kesempatan untuk memperbaiki “rapor” penegakan HAM masih ada karena memang, *keadilan tidak pernah kebilangan kesempatannya*. Kami – sebagai korban – adalah tantangan anda dan kami menantang anda segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM: Kami minta dengan segenap kesadaran utuh dan diikuti dengan rasa kemanusiaan yang tinggi agar Bapak Presiden mau untuk melakukan proses pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM secepatnya.

Demikian permohonan kami, besar harapan kami anda sebagai Presiden yang terpilih secara sah di depan publik Indonesia mau menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM secara adil. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

JSKK,

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM